



**KLIPING DIGITAL
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**

13 – 14 Maret 2023



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

14 / 03 / 2023

Analisis Pemberitaan Media Online

NO	ANALISIS		TONE
1	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME	<p>Senin, 13 Maret 2023</p> <p>https://www.sinarharapan.co/ekonomi/3857977813/indonesia-terpilih-jadi-tuan-rumah-konferensi-internasional-world-water-forum-2024</p> <p>Indonesia Terpilih Jadi Tuan Rumah Konferensi Internasional World Water Forum 2024</p> <p>Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna</p> <p>Terkait pemenuhan kebutuhan air bersih perpipaan, Staf Khusus Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali dalam Seminar I Sub Tema Water and Innovative Finance di Jakarta, Selasa 7 Maret menyebutkan, hingga saat ini cakupan layanan air pipa di seluruh Indonesia baru sekitar 21,69 persen. Dengan persentase tersebut, jika dibandingkan dengan jumlah 267 juta penduduk Indonesia, sektor pengelolaan sumber daya air sangat menarik bagi pihak swasta untuk ikut berkecimpung. Untuk mencapai hal tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna mengatakan diperlukan inovasi pembiayaan infrastruktur air minum. Berdasarkan RPJMN 2020–2024, kebutuhan dana untuk mencapai program 10 Juta SR sebesar Rp123,4 triliun. Sementara diproyeksikan porsi APBN tahun 2022-2024 hanya mampu memenuhi 17 persen atau sekitar Rp21 triliun, APBD sebesar 13 persen atau sekitar Rp15,6 triliun, dan sisanya 70 persen atau sekitar Rp86,8 triliun bersumber dari lainnya, salah satunya investasi.</p>	+
2	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER	<p>Senin, 13 Maret 2023</p> <p>https://www.antaranews.com/berita/3439335/bpk-temukan-sejumlah-masalah-dalam-pengelolaan-dana-flpp-bp-tapera</p> <p>BPK temukan sejumlah masalah dalam pengelolaan dana FLPP BP Tapera</p> <p>Anggota III BPK Achasanul Qosasi</p>	+



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

14 / 03 / 2023

Analisis Pemberitaan Media Online

	RESUME	Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana fasilitas pembiayaan perumahan (FLPP) pada Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Selain itu, penyaluran dana FLPP atas 256 debitur yang tidak tepat sasaran, dan penanganan penyelesaian kredit FLPP terhadap 5.679 debitur yang tidak sesuai ketentuan. Atas permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi agar Komisioner BP Tapera memerintahkan Direktur Perencanaan Strategis, Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan untuk menyelesaikan keseluruhan proses manajemen risiko pengelolaan dana FLPP. Menanggapi temuan BPK, Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengungkapkan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK.	
3	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME	Selasa, 14 Maret 2023 https://banpos.co/2023/03/14/komisi-iv-minta-walikota-evaluasi-pejabat-dinas-pupr/ Komisi IV Minta Walikota Evaluasi Pejabat Dinas PUPR Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon Anugrah Chaerullah Belum adanya pekerjaan fisik pembangunan yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon mendapatkan sorotan dari Komisi IV DPRD Kota Cilegon. Hal ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Kota Cilegon dengan DPUPR Kota Cilegon digelar di Ruang Rapat Komisi, Senin (13/3). Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon Anugrah Chaerullah mendesak lelang pekerjaan segera dilakukan pada awal tahun. Ia juga menekan agar kegiatan di DPUPR Kota Cilegon harus segera dilakukan agar pembangunan di Kota Cilegon segera dirasakan masyarakat.	+



13 / 03 / 2023

Sumber: sinarharapan.co

Indonesia Terpilih Jadi Tuan Rumah Konferensi Internasional World Water Forum 2024

Author: Yuanita SH

SINAR HARAPAN - Setelah sukses sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Tahun 2022 di Bali, Indonesia Kembali terpilih sebagai tuan rumah pertemuan internasional, yakni pertemuan World Water Forum ke-10 yang akan diselenggarakan di Bali pada 18-23 Mei 2024.

Pertemuan internasional terbesar di bidang air ini mengangkat tema “Water for Shared Prosperity” untuk menjawab tantangan dan potensi global yang diakibatkan oleh peningkatan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi.

Presiden Joko Widodo menyampaikan agenda penting yang harus diprioritaskan dalam penyelenggaraan World Water Forum 2024, yakni upaya konservasi air, ketersediaan air bersih dan sanitasi, ketahanan pangan dan energi, serta mitigasi bencana alam berupa banjir dan kekeringan.

Agenda-agenda tersebut harus menjadi kerja bersama, partisipasi rakyat dan kerja sama dari berbagai pihak, dialog dan kemitraan antarnegara yang dilakukan dalam semangat kebersamaan untuk kesejahteraan rakyat dunia.

Mengutip rilis resmi Kementerian PUPR, Presiden World Water Council (WWC), Loïc Fauchon mengajak seluruh negara yang akan hadir dalam forum World Water Forum ke-10 di Bali, Indonesia, pada 2024,

untuk menjadikannya sebagai momentum peningkatan kerja sama untuk pengelolaan air secara global.

Fauchon mengatakan secara khusus permasalahan utama air di negara-negara Asia Tenggara adalah banyaknya sumber air, namun belum dikelola dengan begitu baik. Selain itu pertumbuhan penduduk yang masif juga menjadi tantangan tersendiri untuk mencukupi kebutuhan air bersih.

Terkait pemenuhan kebutuhan air bersih perpipaan, Staf Khusus Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali dalam Seminar I Sub Tema Water and Innovative Finance di Jakarta, Selasa 7 Maret menyebutkan, hingga saat ini cakupan layanan air pipa di seluruh Indonesia baru sekitar 21,69 persen.

Dengan persentase tersebut, jika dibandingkan dengan jumlah 267 juta penduduk Indonesia, sektor pengelolaan sumber daya air sangat menarik bagi pihak swasta untuk ikut berkecimpung.

Pemerintah Indonesia sendiri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 –2024 guna menargetkan 10 juta sambungan air minum ke rumah (SR) lewat jaringan perpipaan.

Namun, untuk mencapai hal tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan



13 / 03 / 2023

Sumber: sinarharapan.co

Perumahan Herry Trisaputra Zuna mengatakan diperlukan inovasi pembiayaan infrastruktur air minum.

Berdasarkan RPJMN 2020–2024, kebutuhan dana untuk mencapai program 10 Juta SR sebesar Rp123,4 triliun. Sementara diproyeksikan porsi APBN tahun 2022-2024 hanya mampu memenuhi 17 persen atau sekitar Rp21 triliun, APBD sebesar 13 persen atau sekitar Rp15,6 triliun, dan sisanya 70 persen atau sekitar Rp86,8 triliun bersumber dari lainnya, salah satunya investasi.

Sebagai langkah untuk menutupi kesenjangan pendanaan (funding gap) non-APBN sebesar 70 persen ini Pemerintah membuka peluang alternatif pendanaan dengan melibatkan badan usaha. Khusus untuk penyediaan air minum perpipaan diharapkan Tahun 2024 mencapai 30 persen.

Permasalahan pemenuhan kebutuhan air bersih atau air minum memang sudah menjadi permasalahan yang belum terpecahkan di [Indonesia](#), karena tidak siapnya infrastruktur pengolahan air minum dan perpipaan sejak dahulu.

Selain mengejar terpenuhinya sambungan perpipaan bagi seluruh masyarakat, Pemerintah [Indonesia](#) juga harus mengejar ketertinggalan kualitas air bersih dari perpipaan.

Pasalnya seperti kita ketahui, air bersih perpipaan di [Indonesia](#) masih tidak layak untuk langsung diminum. Di beberapa negara maju seperti kita ketahui, bahwa hampir seluruh rumah sudah tersambung dengan layanan air perpipaan yang sudah layak untuk langsung diminum tanpa dimasak kembali.

Melihat kondisi dan tantangan tersebut, maka [Indonesia](#) sebagai [tuan rumah](#) World Water Forum ke-10 nanti harus dapat memanfaatkan momentum tersebut sebagai upaya mencari peluang kerja sama untuk peningkatan layanan air bersih perpipaan, sehingga pertemuan tersebut tidak hanya menjadi acara seremonial semata.

<https://www.sinarharapan.co/ekonomi/3857977813/indonesia-terpilih-jadi-tuan-rumah-konferensi-internasional-world-water-forum-2024>



13 / 03 / 2023

Sumber: antaranews.com

BPK temukan sejumlah masalah dalam pengelolaan dana FLPP BP Tapera

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya

Jakarta (ANTARA) – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana fasilitas pembiayaan perumahan (FLPP) pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Permasalahan tersebut di antaranya terkait manajemen risiko pengelolaan dana FLPP yang masih dalam proses penyusunan.

“Selain itu, penyaluran dana FLPP atas 256 debitur yang tidak tepat sasaran, dan penanganan penyelesaian kredit FLPP terhadap 5.679 debitur yang tidak sesuai ketentuan,” ucap Anggota III BPK Ahasanul Qosasi saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas kepatuhan pengelolaan dana FLPP semester I tahun 2022 di kantor BP Tapera, dikutip dari laman resmi BPK, Jakarta, Senin.

Atas permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi agar Komisioner BP Tapera memerintahkan Direktur Perencanaan Strategis, Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan untuk menyelesaikan keseluruhan proses manajemen risiko pengelolaan dana FLPP.

Komisioner BP Tapera juga diminta melakukan koordinasi dengan bank penyalur dalam mengawasi ketepatan sasaran pemanfaatan rumah hasil pembiayaan dana FLPP, melakukan rekonsiliasi saldo *outstanding* pokok

seluruh debitur dengan bank penyalur, serta meminta bank penyalur untuk menyelesaikan kredit atas debitur yang tidak sesuai.

“Diharapkan BP Tapera beserta jajaran dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, karena meski tidak terlalu signifikan, tetap harus diselesaikan,” ujar Qosasi.

Menanggapi temuan BPK, Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengungkapkan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK.

“BPK berperan serta dalam membangun pengelolaan keuangan BP Tapera, BPK merupakan mitra yang baik untuk BP Tapera, BPK telah menjadi mitra navigasi untuk BP Tapera, menempatkan posisi sebagai fasilitator dan mitra kerja yang menemani proses pembelajaran dan implementasi tata pemerintahan yang baik di BP Tapera. Oleh karena itu, dukungan, kerja sama, dan bimbingan dari BPK merupakan hal yang baik untuk BP Tapera, sehingga BP Tapera dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran pemerintah” kata Adi.

Dalam kesempatan yang sama, BPK mengapresiasi pengelolaan dana FLPP BP Tapera yang dinilai sudah dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku dalam semua hal yang material.



**KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**

13 / 03 / 2023

| Sumber: antaranews.com

<https://www.antaranews.com/berita/3439335/bpk-temukan-sejumlah-masalah-dalam-pengelolaan-dana-flpp-bp-tapera>



14 / 03 / 2023

Sumber: banpos.co

Komisi IV Minta Walikota Evaluasi Pejabat Dinas PUPR

CILEGON, BANPOS – Belum adanya pekerjaan fisik pembangunan yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon mendapatkan sorotan dari Komisi IV DPRD Kota Cilegon.

Hal ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Kota Cilegon dengan DPUPR Kota Cilegon digelar di Ruang Rapat Komisi, Senin (13/3).

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon Anugrah Chaerullah mendesak lelang pekerjaan segera dilakukan pada awal tahun. Ia juga menekan agar kegiatan di DPUPR Kota Cilegon harus segera dilakukan agar pembangunan di Kota Cilegon segera dirasakan masyarakat. “Komisi IV sebagai mitra pengawasan, kita tanya lagi, sedikit ada pacuan, nanti kita minta Rapat Dengar Pendapat lagi,” kata Irul sapaan akrabnya kepada awak media usai RDP, Senin (13/3).

“Kayaknya harus ada pecutan, PU ini harusnya running-nya sudah cepat, jangan kerjanya di akhir tahun,” sambungnya.

Lebih lanjut, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta DPUPR Kota Cilegon menghormati DPRD Kota Cilegon dan RDP minimal Kepala Dinas atau Kepala Bidang. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pengawasan terhadap DPUPR Kota Cilegon. “Kita mendorong

Jalan Lingkar Selatan jadi prioritas, kaitan jalan ini jadi konsen serius karena kaitannya dengan arus mudik,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Anggota Komisi IV DPRD Kota Cilegon Baihaki Sulaiman mengatakan, Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPRD Kota Cilegon belum memuaskan karena bukan Kepala DPUPR Kota Cilegon yang datang. “Seharusnya hari ini sudah action pelaksanaan, budaya kerja di tengah-tengah mereka (DPUPR Kota Cilegon) harus dipacu,” ujarnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyoroti soal serapan anggaran di DPUPR Kota Cilegon saat ini yang sudah terserap baru belanja pegawai, sementara pekerjaan fisik belum dilakukan. “Saya rasa walikota tahu ini, ada ruang evaluasi, kembali ke kepala daerah ini mau dibiarkan dengan kondisi seperti ini,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPUPR Kota Cilegon Suheri saat diminta keterangan enggan membeberkan lantaran kegiatan di DPUPR Kota Cilegon di masing-masing bidang. Selain itu, ketidakhadiran Kepala DPUPR Kota Cilegon lantaran adanya keperluan lain yang lebih penting. “Itu ke Kabid saja lah, itu persisnya ke Bidang,” singkatnya.

<https://banpos.co/2023/03/14/komisi-iv-minta-walikota-evaluasi-pejabat-dinas-pupr/>